

PENDIDIKAN ISLAM DI PAKISTAN

Surawardi

Abstrak

Kebijakan pendidikan antara Pakistan dan Indonesia hampir sama yakni menjadikan pendidikan wajib belajar bagi warga negaranya. Hanya saja Pakistan wajib belajarnya hingga tingkat SLTA sementara di Indonesia hanya sampai tingkat SLTP. Sementara lembaga pendidikan yang terdapat di Pakistan dan Indonesia juga hampir sama yakni adanya lembaga pendidikan Umum dan Agama/Madrasah serta sekolah tinggi/universitas baik umum dan keagamaan.

Problematika pendidikan yang terjadi di Pakistan adalah adanya senyalemen yang mengidentifikasi sebagian lembaga pendidikan Agama/Madrasah yang terlibat dalam gerakan teroris. Sementara di Indonesia juga ada terendus isu yang mengidentifikasi hal yang serupa sebagaimana yang terjadi di Pakistan. Problematika lainnya yang hampir sama dengan di Indonesia adalah masih banyaknya anak putus sekolah di Pakistan demikian pula halnya dengan di Indonesia, padahal ada undang-undang yang mengatur wajib belajar bagi anak-anak namun pihak negara belum banyak berbuat untuk melayani amanat undang undang tersebut terbukti tidak adanya *punishment* bagi orang tua yang tidak melaksanakan wajib belajar sebagaimana yang diamanatkan oleh masing-masing undang-undang wajib belajar baik di Pakistan dan demikian pula di Indonesia.

Penanganan pendidikan umum dan agama di Pakistan dan Indonesia juga hampir sama yakni pemerintah, swasta dan LSM. Akan tetapi pendidikan perempuan tentu saja di Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintahan Pakistan.

Kata Kunci: *Pendidikan, Kebijakan, Belajar dan Problematika*

A. Pendahuluan

Republik Islam Pakistan adalah bangsa muslim terbesar kedua di dunia, meskipun mereka berasal dari lima kelompok etnis yang berbeda yakni: Punjabi, Sindhi, Pathan, Baluch serta Muhajir (Imigran berbahasa Urdu dan India sebelum perpecahan). Mayoritas orang Pakistan (97%) adalah Muslim. Minoritas non muslim termasuk orang Kristen, Hindu dan Persi. Di antara muslim 10 % sampai 15 % adalah syiah Istna 'Asya'ariyah (Dua belas Imam). Minoritas sekte Syi'ah termasuk Isma'illiyah, kebanyakan terdapat di Karachi, wilayah barat laut Gilgit, dan Bohoras, sedangkan markas spritualnya terletak di Bombay, India. Mayoritas besar kaum Muslimi Sunni. Pakistan menganut Mazhab

Hanafi meskipun minoritas kecil pengikut Mazhab Hambali. (Ajid Thohir, 2012: 212)

Bahasa Urdu adalah sebagai bahasa umum masyarakat Pakistan dan merupakan bahasa baru yang lahir akibat akumulasi etnik dan percampuran berbagai pengaruh budaya dan bahasa, terutama Persia, Turki, India dan Arab sejak abad ke-13 M di sekitar wilayah-wilayah Afghanistan, Pakistan, Banglades dan India sekarang. Kesultanan Mughal, tampaknya salah satu hegemoni politik yang paling bertanggung jawab pada kurun abad ke-16 M akan kepentingan bahasa Urdu ini, sebagai manifestasi dari kekuatan sosial-budaya di India yang hendak mengidentifikasi diri dan mencoba membedakan dirinya dan kekuatan Shafawiyah di persia dan Utsmani-

yah di Anatoli Turki. Secara dinamis pengaruh sufisme tampaknya semakin mengukuhkan posisi bahasa sebagai salah satu bahasa Islam, terutama dalam mengisi dan mengembangkan kelembutan cita rasanya dalam berbagai sastra yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa Urdu, yang kesemuanya telah mencerminkan akan kualitas dan kepadatan makna secara filosofis dan alegoris dari bahasa ini. (Sayyid Husain Nasr, 1993: 122)

Negara Pakistan Sekarang, terjadi akibat pemisahan dengan pemerintahan India pada 14 Agustus 1947, sejak awal abad ke-19, Inggris mulai mendominasi wilayah tersebut. Secara integral fenomena tersebut berkait erat dengan perjuangan kaum Muslimin India kemudian sebagai manifestasi dari kegiatan politik tersebut umat Islam menentukan sendiri nasib dalam pembentukan wilayah merdeka. Dan Pakistan adalah satu-satunya negara yang unik di antara negara-negara Muslim yang lahir pada abad ke-20 dimana dalam landasan dasarnya didirikan atas nama Islam.

Berawal dari gerakan Sir Sayyid Ahmad Khan untuk reformasi pendidikan dan intelektual-agama serta kegigihannya untuk politik yang terpisah dan penuntutan hak-hak bagi kaum Muslimin di India, kebangkitan agama pun akhirnya bermunculan melalui semangat Islam, seperti gerakan Mujahiddin pimpinan Sayyid Ahmad Syahid dan Gerakan Deoband pimpinan Qasim Nanautvi (1821-1880) serta Maulana Mahmud Al-Hasan (1851-1920). Pada saat gerakan melancarkan jihad bersenjata untuk memulihkan politik di India barat laut. Kaum Deobandi dan gerakan pendidikan Islam lain mencoba membantu kaum Muslimin India untuk mempertahankan warisan Islam tradisional pada masa subordinasi politik mereka pada masa kesulthanan Mughal. Konsep daerah politik muslim berdaulat tetap dipelihara oleh Muhammad Ali (1878-1931) dan Bahadur Yar (1905-1944), diperkuat dengan munculnya gerakan Khilafat pada tahun 1920-an di bawah pimpinan Ali Bersaudara.

Sebelumnya, pada tahun 1906, kaum Elite Muslim berpendidikan Barat telah mendirikan organisasi politik tersendiri bernama Liga Muslim se-India (*All-India Muslim League*) di Dhaka untuk memperjuangkan kepentingan agama, budaya, politik dan ekonomi kaum Muslimin, serta untuk mencegah upaya organisasi nasionalis Hindu yang sedang tumbuh, khawatir akan merenggut hak kaum Muslimin di India pada masa depan. Namun hal yang paling memicu bagi strategi politik baru tersebut adalah kebencian umat hindu terhadap golongan Bengal sehingga meyakinkan Muslim India, bahwa kepentingan agama, budaya dan politik mereka secara organisasi kewilayahan memang harus terpisah. Hal ini menarik bagi Liga Muslim dan *platformnya* untuk segera membentuk perwakilan muslim yang terpisah secara kelembagaan dan wilayah politik. Pada saat yang sama, kaum Hindu ekstrem pun memulai gerakan *Shuddhi dan Sangathan*, yaitu gerakan memaksakan perpindahan agama terhadap kaum muslimin, dan akhirnya kaum muslimin pun bereaksi dengan segera membentuk gerakan tanzhim dan tabligh, konsolidasi dan dakwah.

Liga Muslim di bawah pimpinan Muhammad Ali Jinnah menyadari, bahwa kepentingan agama, budaya dan politik komunitas kaum Muslimin India tidak memperoleh jaminan yang aman dalam wilayah India bersatu di masa pasca kemerdekaan dari Inggris, telah didominasi oleh mayoritas umat Hindu. Oleh karena itu Liga Muslim kemudian bertujuan menciptakan negara terpisah dari daerah India barat laut dan barat daya yang berpenduduk mayoritas Muslim, yang kelak akan bernama Pakistan. Penyair sekaligus filosof, Muhammad Iqbal, juga menguatkan untuk menyentralisasi “kehidupan Islam sebagai kekuatan budaya” di wilayah tertentu melalui pembentukan “*Negara muslim terkonsolidasi*” di bagian barat daya India. Menurutnya, negara otonomi seperti ini akan sangat berarti bagi Islam terutama untuk memberi “kesempatan untuk menyingkirkan

cap Imperialisme Arab yang diberikan kepada Islam secara terpaksa bahkan memobilisasi hukumnya, pendidikannya, kebudayaannya, dan untuk membawa mereka bersentuhan lebih dekat dengan semangat Islam sendiri serta semangat dengan masa modern.”

Diterimanya gagasan Pakistan oleh rakyat secara umum di India, tampaknya hanya dimungkinkan melalui keberhasilan Liga Muslim dalam memolitisasi sentimen agama kaum muslimin India untuk mengklaim bahwa perjuangan untuk Pakistan adalah perjuangan untuk pelestarian dan kejayaan Islam. Sewaktu gerakan pendirian Pakistan hampir mewujudkan tujuannya, watak kebangkitan agamanya pun sudah mantap. Watak kebangkitan Gerakan Pakistan juga memiliki akar sejarah dalam gerakan fundamentalis pramodern, seperti gerakan Syah Waliullah dari Delhi dan Sayyid Ahmad Syahid dari Bareilly. Dorongan kebangkitan ini juga berjalan dengan tradisi nasionalis modernis muslim pada akhir abad ke-19 dan ke-20 dan Sir Sayyid Ahmad Khan, Sayyed Ameer Ali, dan Muhammad Iqbal di satu sisi, serta gerakan kebangkitan agama yang beragama, seperti *Jama'ah Tabligh* dari Maulana Muhammad Ilyas, Gerakan *Sufi Reformasi* dari Maulana Asyraf Ali Tsanavi, dan *Jama'at-i Islami* dari Maulana Abu Al A'la Maududi, Gerakan Khilafat dari Maulana Muhammad Ali Jauhar dan gerakan Khaksar dari Allamah “Inayatullah Al-Masyariqi.

Meskipun gerakan-gerakan keagamaan ini beragam dan memiliki pola dan isu yang berbeda, namun dalam sejarah Islam India kesemuanya telah memberi efek untuk mengarahkan posisi muslimin secara kolektif dalam membelah haluan secara paralel dengan kaum Hindu serta mempertajam kedua komunitas agama itu. Pembelahan pada ujungnya melahirkan ide penciptaan Negara Muslim Pakistan.

Baik Ali Jinnah maupun penyair-filosof Muhammad Iqbal sebagai salah satu tokoh perancang negara Pakistan, tidak memandang Islam pada perincian syari'ah

yang detail dan teknis, tetapi pada tingkat yang selalu berkaitan: 1) Islam sebagai iman, 2) Islam sebagai kebudayaan hidup yang akan mengintegrasikan muslim sebagai suatu negara-bangsa, dan 3) Islam sebagai sikap dan ideologi politik yang rangkaian nilainya akan menjadikan suatu komunitas politik yang hidup dan terpisah, steril dari berbagai gangguan luar lainnya.

B. Pembahasan

1. Dinamika Kelembagaan/Sistem Kelembagaan

Pendidikan di Pakistan diawasi oleh Departemen Pendidikan Pemerintah Pakistan serta pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah federal sebagian besar membantu dalam pengembangan kurikulum, akreditasi dan dalam pembiayaan penelitian dan pengembangan. Pasal 25-A Konstitusi Pakistan mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan berkualitas gratis dan wajib untuk anak-anak dari kelompok usia 5 sampai 16 tahun. “Negara harus menyediakan pendidikan gratis dan wajib untuk semua anak-anak usia 5-16 tahun dengan cara seperti dapat ditentukan oleh hukum.”

Sistem pendidikan di Pakistan umumnya dibagi menjadi lima tingkatan: *primary /primer* (kelas satu sampai lima), *middle/tengah* (kelas enam sampai delapan), *high/menengah* (sembilan dan sepuluh, yang mengarah ke Sekolah Menengah, *Certificate atau SSC*), *intermediate/tinggi* (kelas sebelas dan dua belas, yang mengarah ke *Higher Secondary* (Sekolah) Sertifikat atau HSC), *program dan universitas* terkemuka sarjana dan gelar sarjana.

Tahapan pendidikan formal: Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, Pendidikan Tersier, Pendidikan Kwartir. Pendidikan formal pendidikan dasar Hanya 87 % anak-anak Pakistan menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Sistem standar nasional pendidikan terutama terinspirasi dari sistem Inggris. Pendidikan pra-sekolah dirancang untuk berusia 3-5 tahun dan biasanya terdiri dari tiga tahap: Kelompok Bermain, Taman Kanak dan TK (juga

disebut “KG” atau “Prep”). Setelah pendidikan pra-sekolah, siswa melalui SMP dari kelas 1 sampai 5. Hal ini didahului dengan sekolah menengah dari kelas 6 sampai 8. Di sekolah menengah, pendidikan seks masuk dalam kurikulum pendidikan pemerintah. Kurikulum biasanya tunduk pada institusi tersebut. Delapan disiplin ilmu yang diajarkan pada sekolah formal yakni: Urdu, bahasa Inggris, matematika, seni, ilmu pengetahuan, ilmu sosial, Islamiyat dan terkadang studi komputer (tergantung ketersediaan laboratorium komputer). Bahasa provinsi dan regional seperti Punjabi, Sindhi, Pashto dan lain-lain dapat diajarkan di masing-masing provinsi, khususnya di sekolah-sekolah bahasa menengah. Beberapa lembaga memberikan instruksi dalam bahasa asing seperti Turki, Arab, Persia, Perancis dan Cina. Bahasa pengantar tergantung pada sifat dari lembaga itu sendiri, apakah itu sebuah sekolah Inggris menengah atau sekolah menengah Urdu. Pada 2009, Pakistan menghadapi tingkat kehadiran sekolah dasar untuk kedua jenis kelamin dari 66 persen. Sosok di bawah perkiraan rata-rata dunia 90 persen.

Kinerja yang buruk Pakistan di sektor pendidikan terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi publik. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan telah 2,2 persen dari GNP dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan marginal dari 2 persen sebelum 1984-85. Selain itu, alokasi dana pemerintah minim terhadap pendidikan tinggi, yang memungkinkan kelas atas pendapatan untuk menuai mayoritas manfaat subsidi publik untuk pendidikan. Lembaga pendidikan yang lebih rendah seperti sekolah dasar menderita di bawah kondisi seperti kelas berpenghasilan rendah tidak dapat menikmati subsidi dan pendidikan yang berkualitas. Akibatnya, Pakistan memiliki salah satu tingkat terendah melek huruf di dunia dan yang terendah di antara negara-negara sumber daya komparatif dan situasi sosial-ekonomi. (Rasool Memon, Ghulam, 2007: 47-55)

Pendidikan menengah di Pakistan dimulai dari kelas 9 dan berlangsung selama empat tahun. Setelah akhir masing-masing tahun sekolah, mahasiswa diwajibkan untuk lulus ujian nasional yang dikelola oleh Dewan regional Menengah dan Pendidikan Menengah. Setelah menyelesaikan kelas 9, siswa diharapkan untuk mengambil tes standar di setiap bagian pertama dari mata pelajaran akademik mereka. Mereka kembali memberikan tes ini bagian kedua dari program yang sama pada akhir kelas 10. Setelah berhasil menyelesaikan ujian ini, mereka diberikan Sekolah *Certificate Secondary*. Hal ini secara lokal disebut sebagai '*matrikulasi sertifikat*' atau '*matric*' untuk pendek.

Kurikulum biasanya mencakup kombinasi dari delapan program termasuk pilihan (seperti Biologi, Kimia, dan Fisika Komputasi) serta mata kuliah wajib (seperti Matematika, Bahasa Inggris, Urdu, Islamiat dan Studi Pakistan). Siswa kemudian masukkan perguruan tinggi menengah dan nilai lengkap 11 dan 12. Setelah menyelesaikan masing-masing dua kelas, mereka kembali mengambil tes standar dalam mata pelajaran akademik mereka. Setelah berhasil menyelesaikan ujian ini, siswa diberikan *Higher Secondary (Sekolah) Certificate (HSC)*. Tingkat pendidikan juga disebut *FSc/FA/ICS* atau '*menengah*'. Ada banyak aliran siswa dapat memilih untuk 11 dan 12 nilai-nilai mereka, seperti *pra - medis, pra - engineering, humaniora (atau ilmu-ilmu sosial), ilmu komputer dan perdagangan*. Setiap aliran terdiri dari tiga pilihan dan serta tiga mata pelajaran wajib bahasa Inggris, Urdu, Islamiah (kelas 11 saja) dan Studi Pakistan (kelas 12 saja).

Ada jenis lain dari pendidikan di Pakistan yang disebut Pendidikan Teknis yakni: Punjab Dewan Pendidikan Teknis, Dewan Pendidikan Teknis, dan *Sindh Dewan Pendidikan Teknis*, menyediakan fasilitas pendidikan teknis. Punjab Dewan Pendidikan Teknis menawarkan *tac Matric*. dan *D.A.E. (Diploma Associate Engineering)* dalam teknologi seperti Sipil, Kimia,

Arsitektur, Teknik, Listrik, Elektronik, Ilmu Komputer dan masih banyak lagi teknologi. Ini adalah program tiga tahun dan menggabungkan Fisika, Kimia, studi Islam, Pakistan Study dan lainnya lebih dari 25 buku yang terkait dengan teknologi mereka. Setelah matrik dan kemudian tiga tahun diploma sama dengan kelas 12, dan pemegang diploma *Iscaled Asosiasi Insinyur*. Entah mereka dapat bergabung bidangnya masing-masing atau dapat mengambil masuk di B.Tech. atau BE dalam teknologi yang terkait setelah D.A.E. pendidikan tersier *The University of the Punjab*, didirikan 1882 di Lahore, adalah universitas tertua dari Pakistan.

Menurut UNESCO 2009 Global Education Digest, 6,3% dari Pakistan (8,9 % laki-laki dan 3,5% perempuan) adalah lulusan universitas pada 2007. Pakistan berencana untuk meningkatkan angka tersebut menjadi 10 % pada tahun 2015 dan selanjutnya menjadi 15 % pada tahun 2020. Ada juga banyak variasi antara kelompok usia. Kurang dari 6% dari mereka yang berada di kelompok umur 55-64 memiliki gelar, dibandingkan dengan 8% pada kelompok umur 45-54, 11% dalam kelompok usia 35-44 dan 16 % pada kelompok umur 25-34. *GIK Institute* dari *Menara Jam Quaid -i- Azam Universitas entrance*. Setelah mendapatkan HSC mereka, siswa dapat belajar di sebuah perguruan tinggi profesional untuk program gelar Bachelor seperti teknik (*B.Engg/BS Engg.*), B.Tech Hons / BS Engg.Tech kedokteran (*MBBS*), kedokteran gigi (*BDS*), kedokteran hewan (*DVM*), hukum (*LLB*), arsitektur (*B.Arch*), farmasi (*Pharm-D*) dan keperawatan (*B.Nurs*). Kursus ini membutuhkan empat atau lima tahun studi. Ada beberapa dewan dan papan yang akan menangani semua urusan pendidikan dalam kasus ini, mereka adalah PMDC, Pakistan dewan farmasi dan Pakistan dewan keperawatan. Siswa juga dapat menghadiri sebuah universitas untuk *Bachelor of Arts (BA)*, *Bachelor of Science (BSc)*, *Bachelor of Commerce (BCom)* atau *Bachelor of Business Administration (BBA)*

program gelar. Semua ini adalah program yang dilakukan di Pakistan dan benar-benar umum. Hari-hari ini dokter farmasi juga mendapatkan banyak reputasi. Dewan farmasi Pakistan melakukan perjuangan besar untuk membuat pendidikan farmasi yang lebih baik.

Ada dua jenis program Sarjana di Pakistan: Pass atau Honors. Lulus gelar membutuhkan dua tahun studi dan mahasiswa biasanya membaca tiga mata pelajaran opsional (seperti Kimia atau Ekonomi) di samping jumlah yang hampir sama dari mata kuliah wajib (seperti Studi Pakistan Inggris dan). Gelar *Honours* membutuhkan tiga atau empat tahun studi, dan mahasiswa biasanya mengkhususkan diri dalam bidang studi pilihan, seperti *Biochemistry* (BSc Hons. Biokimia). Hal ini dapat dicatat bahwa Lulus Sarjana sekarang perlahan-lahan sedang dihapus untuk *Honours* di seluruh negeri.

Sebagian besar program gelar Master memerlukan pendidikan dua tahun. *Master of Philosophy (M.Phil)* tersedia di sebagian besar mata pelajaran dan dapat dilakukan setelah melakukan Masters. *Doctor of Philosophy (PhD)* pendidikan tersedia di area tertentu dan biasanya dikejar setelah mendapatkan gelar M.Phil. Mahasiswa mengejar gelar PhD atau M.Phil harus memilih bidang tertentu dan universitas yang melakukan riset di bidang tersebut. M.Phil dan pendidikan PhD di Pakistan membutuhkan minimal dua tahun studi.

Di Pakistan, diskriminasi gender dalam pendidikan terjadi antara rumah tangga termiskin tetapi tidak ada di antara rumah tangga kaya. Hanya 18% dari perempuan Pakistan telah menerima 10 tahun atau lebih dari sekolah. [12] Di antara kritik lain wajah sistem pendidikan Pakistan adalah ketimpangan gender di tingkat pendaftaran. Namun, dalam beberapa tahun terakhir beberapa kemajuan telah dibuat dalam berusaha untuk memperbaiki masalah ini. Pada 1990-1991, perempuan terhadap laki-laki (F/M ratio) pendaftaran adalah 0,47 untuk tingkat dasar pendidikan. Ini

mencapai 0,74 pada tahun 1999-2000, menunjukkan rasio F/M telah meningkat 57,44% dalam dekade. Untuk jenjang pendidikan menengah itu 0,42 di awal dekade dan meningkat menjadi 0,68 pada akhir dekade, jadi itu telah meningkat hampir 62%. Dalam kedua kasus kesenjangan gender menurun tetapi relatif lebih cepat di tingkat menengah. Perbedaan gender dalam partisipasi di tingkat menengah pendidikan adalah 0,4 pada tahun 1990-91 dan 0,67 pada tahun 1999-2000, menunjukkan bahwa kesenjangan menurun sebesar 67,5% pada dekade ini. Di tingkat perguruan tinggi itu 0,50 pada tahun 1990-91 dan mencapai 0,81 pada tahun 1999-2000, menunjukkan bahwa kesenjangan menurun sebesar 64%. Kesenjangan gender telah menurun relatif cepat di sekolah menengah. Kesenjangan gender dipengaruhi oleh penegakan Taliban dari larangan lengkap tentang pendidikan perempuan di distrik Swat, seperti yang dilaporkan dalam 21 Januari 2009 edisi koran harian Pakistan *The News*. Sekitar 400 sekolah swasta mendaftarkan 40.000 perempuan telah ditutup. Sekolah setidaknya 10 anak perempuan yang mencoba untuk membuka setelah 15 Januari 2009 batas waktu oleh Taliban diledakkan oleh militan di kota Mingora, markas besar distrik Swat. Lebih dari 170 sekolah telah dibom atau dibakar, bersama dengan bangunan milik pemerintah lainnya.

Ada perbedaan besar dalam tingkat partisipasi anak laki-laki, dibandingkan dengan anak perempuan di Pakistan. Menurut data UNESCO, pendaftaran sekolah dasar untuk anak perempuan berdiri di 60 persen dibandingkan dengan 84 persen untuk anak laki-laki. Angka partisipasi sekolah menengah berdiri di tingkat yang lebih rendah dari 32 persen untuk perempuan dan laki-laki 46 persen. Kehadiran di sekolah reguler bagi siswa perempuan diperkirakan mencapai 41 persen sedangkan untuk siswa laki-laki adalah 50 persen.

Dimensi kualitatif di Pakistan, kualitas pendidikan memiliki kecenderungan menurun. Kekurangan guru dan laborator-

um tidak memadai telah menghasilkan kurikulum keluar-tanggal yang memiliki sedikit relevansi untuk menyajikan kebutuhan hari. Dimensi kuantitatif faktor penyebab termasuk kurikulum yang rusak, sedang ganda instruksi, rendahnya kualitas guru, kecurangan dalam ujian dan ruang kelas yang penuh sesak. Namun, upaya berada di jalan molding kurikulum untuk memenuhi kebutuhan nasional. Prestasi Abdus Salam *University of Engineering and Technology*, Lahore Artikel utama: Abdus Salam Abdus Salam adalah seorang ahli fisika teoritis Pakistan dan pemenang Nobel dalam Fisika untuk karyanya pada penyatuan elektro angkatan elektromagnetik dan lemah. Salam, Sheldon Glashow dan Steven Weinberg berbagi 1979 Hadiah Nobel untuk penemuan ini. Salam memegang perbedaan menjadi yang pertama Pakistan dan Muslim untuk menerima hadiah dalam ilmu. Salam sangat berkontribusi pada peningkatan fisika Pakistan untuk masyarakat Fisika di dunia.

Belanja pendidikan sebagai persentase dari PDB. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terletak di pinggiran 2 persen dari PDB. Namun, pada 2009 pemerintah menyetujui kebijakan pendidikan nasional yang baru, yang menetapkan bahwa pengeluaran pendidikan akan meningkat menjadi 7 % dari PDB, sebuah ide yang pertama kali diusulkan oleh pemerintah Punjab. Sasaran kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Apa yang luar biasa hal-hal yang akan terjadi yang akan memungkinkan Pakistan untuk mencapai dalam enam tahun apa belum mampu untuk meletakkan tangan di dalam enam dekade terakhir? Dokumen kebijakan kosong pada pertanyaan ini dan tidak membahas asumsi yang membentuk dasar dari target ini. Perhitungan penulis menunjukkan bahwa selama 37 tahun terakhir, pengeluaran publik tertinggi pendidikan adalah 2,80 persen dari PDB pada tahun 1987-1988. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sebagai persentase dari GDP sebenarnya dikurangi 16 tahun dan dipelihara dalam 5 tahun antara 1972-73 dan

2008-09. Dengan demikian, dari total 37 tahun sejak 1972, pengeluaran publik untuk pendidikan sebagai persentase dari PDB baik menurun atau tetap stagnan selama 21 tahun. Penulis berpendapat jika tren linear yang dipertahankan sejak tahun 1972, Pakistan bisa menyentuh 4 persen dari PDB sebelum tahun 2015. Namun, tidak mungkin terjadi karena tingkat pengeluaran yang telah tetap secara signifikan tak terduga dan tidak stabil di masa lalu. Mengingat lintasan ini mengecewakan, meningkatkan pengeluaran publik untuk pendidikan sampai 7 persen dari PDB akan tidak kurang dari sebuah keajaiban, tetapi itu tidak akan menjadi alam yang saleh. Sebaliknya, itu akan menjadi salah satu dari sifat politik karena itu harus "diciptakan" oleh orang-orang yang berada dipucuk pimpinan urusan. Penulis menunjukkan bahwa sedikit keberhasilan hanya dapat dilakukan jika Pakistan mengadopsi "*tidak konvensional*" pendekatan pendidikan. Artinya, sektor pendidikan harus diperlakukan sebagai sektor khusus dengan imunitas alokasi anggaran untuk itu dari tekanan fiskal dan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Alokasi untuk pendidikan tidak boleh terpengaruh oleh ruang fiskal diperas atau lonjakan pengeluaran militer atau utang. Pada saat yang sama, ada kebutuhan untuk memperdebatkan opsi lain tentang bagaimana Pakistan dapat "menciptakan" keajaiban meningkatkan belanja pendidikan sampai 7 persen dari PDB pada tahun 2015.

Peringkat universitas dunia Menurut Standar Mutu World University Ranking 2010 ada dua universitas Pakistan di antara top 200 Teknologi Universitas of the World. Sebelas Pakistan perguruan tinggi lain termasuk Universitas Teknik dan Teknologi, Lahore, *Institute Of Technology* Ruang Angkasa (IST), *Quaid - e - Azam University*, *National University of Science & Technology*, University of Karachi, antara Dunia Top 1000 Universitas dunia peringkat, menurut Ranking dunia Universitas. Bahasa Pendidikan di Pakistan dilakukan dalam dua bahasa, Urdu dan Inggris. Sementara Urdu

adalah bahasa nasional, pada awalnya dan awalnya dikembangkan di Uttar Pradesh di negara tetangga India. Bahasa dipilih sebagai bahasa nasional oleh pendiri Muhammad Ali Jinnah dan tidak ada kaitannya dengan keyakinan bahwa itu dibawa ke Pakistan selama Partisi dari India oleh para migran yang disebut Muhajir Urdu. Urdu cepat mendominasi lanskap politik Pakistan dan Urdu adalah wajib di semua sekolah dan lembaga pendidikan sebagai bagian dari strategi untuk melemahkan bahasa adat dan budaya daerah (beberapa dari mereka yang Punjabi, Sindhi, Pashto, Brahui). Pendidikan di Pakistan sangat terpengaruh oleh bias bahasa.

Menurut laporan British Council 2010, ini pengenaan paksa Urdu speaker non-Urdu di sekolah dan universitas Pakistan telah mengakibatkan degradasi sistematis dan penurunan dari banyak budaya asli Pakistan, sebagian bertanggung jawab untuk peningkatan pemberontakan reaksioner terhadap *ethnocracy* ini (seperti nasionalisme Sindhi, Baloch pemberontakan dll), dan berkontribusi terhadap ketidakpuasan dan instabilitas politik di negara itu. laporan ini juga mengutip meningkatnya angka buta huruf di Pakistan antara adat dan atribut untuk pengenaan paksa Urdu di sekolah, mengarah ke non-penutur Urdu, merasa terancam oleh pengabaian bahasa mereka dalam pendidikan Pakistan, menjadi semakin enggan untuk mendaftar di sekolah tersebut.

Pendidikan di Pakistan sangat dipengaruhi oleh agama. Sebagai contoh, sebuah studi guru sains Pakistan menunjukkan bahwa banyak menolak evolusi berdasarkan alasan keagamaan. Namun, kebanyakan guru Pakistan (14 dari 18) baik diterima atau mempertimbangkan kemungkinan evolusi organisme hidup, walaupun hampir semua Pakistan guru sains menolak evolusi manusia karena mereka percaya bahwa manusia tidak berevolusi dari kera. Meskipun banyak guru menolak evolusi manusia, semua setuju bahwa tidak ada kontradiksi antara ilmu pengetahuan dan Islam pada umumnya.

Pendidikan agama Islam di Pakistan terbagi kepada tiga kategori: a) Quranic School. b) Mosque Primary School. c) Madrasah. (Uzma Anzar, 2003: 14-15) Pertama adalah sekolah dimana anak-anak belajar membaca Al-quran (baca: belajar iqra'). Tempat biasanya di masjid-masjid atau mushalla desa. Waktu belajar tidak teratur dengan jelas. Ada yang pagi, siang dan sore. Ustadz yang mengajar biasanya berasal dari desa tersebut. *Kedua* sekolah dasar masjid, yaitu masjid dijadikan tempat belajar bagi anak-anak yang sudah berumur 7 tahun ke atas. Inisiatif ini resmi dilakukan oleh pemerintah Zia-ul-Haq pada tahun 80an untuk mengatasi minimnya tempat belajar di pedesaan disebagian tempat di Pakistan. Selain belajar Al-quran mereka juga diajarkan oleh imam masjid setempat mata pelajaran bahasa urdu dan matematika. Namun pendidikan ini sering terkendala disebabkan para imam jarang yang menguasai bahasa urdu dan matematika dengan baik, yang akhirnya kebanyakan sekolah gulung tikar. Sekarang jumlah Mosque Primary School diseluruh Pakistan sekitar 25.000 buah sekolah. Dan yang terakhir adalah madrasah. Madrasah di Pakistan berbeda dengan pesantren di Indonesia. Di Indonesia para santri tidak diwajibkan untuk menghafal Alquran seluruhnya, kecuali pesantren tersebut pesantren hifzul Alquran. Berbeda dengan di Pakistan, madrasah mewajibkan kepada murid-muridnya untuk menghafal Al-quran 30 juz sebelum belajar materi-materi lain. Karena al-quran merupakan asas bagi pelajar yang ingin mendalami ilmu agama.

Ada lima aliran besar pemikiran (*school of Thought*) di madrasah Pakistan: *Deobandi, Barelwi, Ahli Hadith, Salafi dan Syiah*. Tiap-tiap aliran pemikiran ini mempunyai metode pembelajaran yang berbeda. Tapi, Deobandi dan Barelwi adalah dua pemikiran yang paling dominan di seluruh madrasah Pakistan. Seperti yang telah disinggung dipendahuluan, bahwa lahirnya madrasah-madrasah di Pakistan tidak lepas

dari campur tangan pemerintah dan jaringan internasional lainnya.

2. Refleksi (Relevansi dengan Pendidikan Islam di Indonesia)

Banyak relevansi sistem pendidikan yang dilaksanakan di Pakistan dengan yang dilakukan di Indonesia. Secara yuridis formal di Pakistan ada undang-undang yang mengatur tentang wajib belajar bagi anak antara usia 5-16 tahun. Pasal 25 -A Konstitusi Pakistan mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan berkualitas gratis dan wajib untuk anak-anak dari kelompok usia 5 sampai 16 tahun. " Negara harus menyediakan pendidikan gratis dan wajib untuk semua anak-anak usia 5-16 tahun dengan cara seperti dapat ditentukan oleh hukum.

Bagi bangsa Indonesia dikenal dengan Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sebagai refleksi dari sistem ini semestinya di Indonesia wajib belajar mengikuti apa yang dilakukan di Pakistan yakni wajib belajar 12 tahun mulai dari tingkat Sekolah Dasar/MI hingga SMA/MA. Demikian pula anggaran pendidikan di Indonesia semestinya mengikuti Pakistan yakni dari semula 20 % menjadi 30 %.

Peningkatan pendidikan wajib belajar menjadi pendidikan wajib belajar 9 menjadi 12 tahun dengan harapan terwujud pemerataan pendidikan dasar (SD dan SLTP hingga SMA) yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan UU No: 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian lebih dipertegas lagi di dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagaimana yang tertuan pada pasal 34 sebagai berikut: (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun

dapat mengikuti program wajib belajar. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Di dalam GBHN 1993, dicantumkan bahwa pemerintah harus berupaya untuk memperluas kesempatan pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan menengah kejuruan, maupun pendidikan profesional, melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan belajar pendidikan dasar, maka pada tanggal 2 Mei 1994 pemerintah mencanangkan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Lebih lanjut dikemukakan bahwa tahap penting dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatkan pendidikan wajib belajar 6 tahun menjadi 9 tahun.

Pendidikan wajib belajar 9 tahun menganut konsepsi pendidikan semesta (*universal basic education*), yaitu suatu wawasan untuk membuka kesempatan pendidikan dasar. Jadi sasaran utamanya adalah menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua dan peserta didik yang telah cukup umur untuk mengikuti pendidikan, dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja secara makro. Maksud utamanya adalah agar anak-anak memiliki kesempatan untuk terus belajar sampai dengan usia 15 tahun, dan sebagai landasan untuk belajar lebih lanjut baik dijenjang pendidikan lebih tinggi maupun di dunia kerja. Pelaksanaan pendidikan wajib belajar 9 tahun telah diatur lebih luas di dalam UU No: 20 tahun 2003. Bahwa sistem pendidikan nasional memberi hak kepada setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan juga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (pasal 5 ayat 1 dan 5). Bagi

warga negara yang memiliki kelainan emosional, mental, intelektual, dan atau sosial serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian juga warga negara di daerah terpencil atau terkebelakang serta masyarakat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus (pasal 5 ayat 2, 3 dan 4). Lebih jauh dijelaskan bahwa pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi anak usia 7 sampai 15 tahun harus diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat tanpa dipungut biaya. Merujuk pada paparan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa ciri-ciri pelaksanaan pendidikan wajib belajar-9 tahun di Indonesia adalah: 1) tidak bersifat paksaan melainkan persuasif, 2) tidak ada sanksi hukum, 3) tidak diatur dengan Undang-Undang tersendiri, dan 4) keberhasilan diukur dengan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Wardiman Djojonegoro, (1992) mengemukakan alasan-alasan yang melatar belakangi dicanangkannya program pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi semua anak usia 7-15 mulai tahun 1994 adalah: 1) Sekitar 73,7% angkatan kerja Indonesia pada tahun 1992 hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau lebih rendah, yaitu mereka tidak tamat Sekolah Dasar, dan tidak pernah sekolah. Jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapura. 2) Dan sudut pandang kepentingan ekonorm', pendidikan, dasar 9 tahun merupakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat member, nilai tambah lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan rata-rata pendidikan dasar 9 tahun, dimungkinkan bagi mereka dapat memperluas wawasannya dalam menciptakan kegiatan ekonomi secara lebih beranekaragam (*diversified*). 3) Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk lebih mampu berperan serta sebagai pelaku ekonomi dalam sektor-sektor

ekonomi atau sektor-sektor industri. 4) Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Dengan meningkatnya penguasaan kemampuan dan keterampilan, akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidupnya. 5) Dengan semakin meluasnya kesempatan belajar 9 tahun, maka usia minimal angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Berdasarkan alasan-alasan yang melatarbelakangi dicanangkan program-program pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagaimana yang dikemukakan di atas, memberikan gambaran bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dapat memberi nilai tambah pada diri individu (masyarakat) itu sendiri mengenai penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, yang dapat mengantar pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas kerja, martabat, dan kesejahteraan hidupnya, hanya dapat dicapai lewat penuntasan pelaksanaan pendidikan untuk semua.

Pendidikan di Pakistan sangat dipengaruhi oleh agama. Sebagai contoh, sebuah studi guru sains Pakistan menunjukkan bahwa banyak menolak evolusi berdasarkan alasan keagamaan. "Meskipun banyak guru menolak evolusi manusia," semua setuju bahwa 'tidak ada kontradiksi antara ilmu pengetahuan dan Islam' pada umumnya" Pada aspek ini juga berlaku bagi pendidikan di Indonesia dimana evolusi tidak dapat diterima sebagai sebuah teori Sains karena bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadits. Kemudian sekarang ini pada lembaga-lembaga pendidikan diprogramkan secara nasional adanya integrasi Ilmu yakni Ilmu-ilmu umum diintegrasikan dengan ilmu agama mulai dari penerapan kurikulum SD hingga perguruan tinggi. Kenyataan ini juga menunjukkan adanya pengakuan sebagaimana yang terjadi di Pakistan bahwa di Indonesia juga mengakui bahwa tidak ada

kontradiksi antara ilmu pengetahuan dengan agama.

Pendidikan agama Islam di Pakistan terbagi kepada tiga kategori: yakni: (a) Quranic School. (b) Mosque Primary School. (c) Madrasah. Pertama adalah sekolah dimana anak-anak belajar membaca Al-quran (baca: belajar iqra'). Tempatnya di masjid-masjid atau mushalla desa. Kategori ini sama dengan TKA/TPA yang terjadi di Indonesia, dimana tempatnya sebagian besar juga dilaksanakan di Masjid dan Mushalla/langgar. Yang membedakan adalah Waktu belajar di Indonesia sangat teratur dan terjadwal sementara di Pakistan tidak teratur dengan jelas. Ustadz yang mengajar biasanya juga berasal dari desa tersebut. Kedua, sekolah dasar masjid, yaitu masjid dijadikan tempat belajar bagi anak-anak yang sudah berumur 7 tahun ke atas. Inisiatif ini resmi dilakukan oleh pemerintah Zia-ul-Haq pada tahun 80an untuk mengatasi minimnya tempat belajar di pedesaan disebagian tempat di Pakistan. Selain belajar Al-quran mereka juga diajarkan oleh Imam Masjid setempat mata pelajaran bahasa urdu dan matematika. Namun pendidikan ini sering terkendala disebabkan para imam jarang yang menguasai bahasa urdu dan matematika dengan baik, yang akhirnya kebanyakan sekolah gulung tikar. Untuk pendidikan jenis kedua ini juga berlaku di Indonesia pada tahun delapan puluhan dimana Masjid dan Mushalla juga termasuk tempat menggali pengetahuan agama dan ilmu bahasa arab. Bedanya dengan di Indonesia adalah pada lembaga masjid ini tidak diajarkan matematika. Tergerusnya lembaga pendidikan Masjid di Indonesia bukan karena faktor gurunya akan tetapi sudah tersedianya lembaga pendidikan pondok pesantren yang cukup untuk menampung pembelajaran agama dan ilmu bahasa Arab. Ketiga: adalah madrasah. Madrasah di Pakistan berbeda dengan pesantren di Indonesia. Di Indonesia para santri tidak diwajibkan untuk menghafal Alquran seluruhnya, kecuali pesantren tersebut pesantren hizful Alquran. Dalam hal ini semestinya di Indonesia

meskipun mengikuti apa yang dilakukan di Pakistan yakni adanya standarisasi untuk mewajibkan hafalan al Qur'an bagi siswa Madrasah. Bahkan hingga ke perguruan Tinggi apapun jenis fakultas dan jurusan. Berbeda dengan di Pakistan, madrasah mewajibkan kepada murid-muridnya untuk menghafal Al-quran 30 juz sebelum belajar materi-materi lain. Karena al-quran merupakan asas bagi pelajar yang ingin mendalami ilmu agama. Seandainya sistem ini dijalankan di Indonesia maka ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi watak dan sikap korup yang saat ini merajalela di Indonesia saat ini.

Bahkan yang paling fundamental dimana lembaga pendidikan Umum mewajibkan tiga mata pelajaran wajib di Pakistan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yakni bahasa Inggris, urdu dan Islamiyat. Ini mengidentifikasi adanya relevansi juga dengan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia sekarang dimana mata pelajaran bahasa Indonesia dan Agama Islam menjadi mata pelajaran wajib yang di- UAN- kan. Sementara Bahasa Inggris baru diwajibkan pada tingkat SMP hingga perguruan tinggi untuk tingkat SD jalan kearah menjadikan Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran Inggris sudah dilakukan yakni sudah diberikan pada kelas III/SD. Untuk kurikulum TK tidak ada perbedaan antara Pakistan dan Indonesia. Yakni secara teoritis memang tidak ada tuntutan untuk belajar dan menulis tetapi karena kurikulum SD/MI tidak menganut azas relevansi dan berkesinambungan (*kuntinuitas*, maka pada tatanan praktisnya tetap masih diajarkan kewajiban belajar membaca dan menulis serta berhitung pada tingkat pendidikan TK/RA. Kedepannya semestinya untuk kurikulum TK/RA di Indonesia barangkali lebih berorientasi kepada Australia atau Belanda yang hanya materi ajarnya menekankan kepada materi bermain dan pengenalan terhadap konsep huruf dalam berbahasa dan konsep angka dengan simbol-simbol gambar dalam pembelajaran matematika. Refleksi lainnya yang mungkin

dapat dilakukan sehubungan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia adalah adanya perguruan tinggi jurusan teknologi Ruang Angkasa sebagaimana yang telah dilakukan di Pakistan.

C. Simpulan

Akar sejarah terbentuknya pemerintahan Pakistan adalah adanya semangat keagamaan yang kuat atas pengaruh mayoritas Hindu yang terdapat di India sehingga akhirnya terlahirlah negara Pakistan yang mengatasnamakan negara Islam Pakistan dan secara resmi disebutkan pada Undang-Undang Pemerintahan Pakistan. Lainnya halnya dengan di Indonesia terbentuknya Negara RI adalah adanya semangat nasionalis dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Semangat nasionalis tersebut tanpa membeda-bedakan suku agama dan bahasa sehingga Indonesia bukan negara Muslim meskipun termasuk negara mayoritas muslim terbesar di dunia.

Kebijakan pendidikan antara Pakistan dan Indonesia hampir sama yakni menjadikan pendidikan wajib belajar bagi warga negaranya. Hanya saja Pakistan wajib belajarnya hingga tingkat SLTA sementara di Indonesia hanya sampai tingkat SLTP. Sementara lembaga pendidikan yang terdapat di Pakistan dan Indonesia juga hampir sama yakni adanya lembaga pendidikan Umum dan Agama /Madrasah serta sekolah tingg/universitas baik umum dan keagamaan.

Problematika pendidikan yang terjadi di Pakistan adalah adanya senyalemen yang mengidentifikasi sebagian lembaga pendidikan Agama/Madrasah yang terlibat dalam gerakan teroris. Sementara di Indonesia juga ada terendus isu yang mengidentifikasi hal yang serupa sebagaimana yang terjadi di Pakistan. Problematika lainnya yang hampir sama dengan di Indonesia adalah masih banyaknya anak putus sekolah di Pakistan demikian pula halnya dengan di Indonesia, padahal ada undang-undang yang mengatur wajib belajar bagi anak-anak namun pihak negara belum banyak berbuat untuk melayani amanat undang undang ter-

sebut terbukti tidak adanya *punishment* bagi orang tua yang tidak melaksanakan wajib belajar sebagaimana yang diamanatkan oleh masing-masing Undang-undang wajib belajar baik di Pakistan, Bangladesh demikian pula di Indonesia.

Penanganan pendidikan umum dan agama di Pakistan dan Indonesia juga hampir sama yakni pemerintah, swasta dan LSM. Akan tetapi pendidikan perempuan tentu saja di Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintahan Pakistan.

DAFTAR PUSTAKA

- Thohir, Ajid, 2012. *Studi Kawasan Dunia Islam, Perspektif Etno-Linguistik dan Geo Politik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Azra, Azyumardi, 2009. *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta Logos Wacana Ilmu.
- Lys, Candice, (June 2006) "Demonizing the "other": *Fundamentalist Pakistani Madrasah and the Construction of Religious Violence*", Marburg Journal of Religion: Vol: 11, No. 1.
- Farish A. Noor, Yoginder Sikand & Martin Van Bruinessen (eds), 2007 *The Madrasah in Asia Political Activism and Transnational Linkages*, Amsterdam: University Press.
- Musbikin, Imam, 2005 *Studi Islam Kawasan*, Riau: Zanafa Publishing.
- Ikram, S. M., tth. *Muslim Civilization in India*, New York: Colombia Universitas Press.
- Ahmad, Ishfaq, (1998-11-21). "CERN and Pakistan: a Personal Perspective". *CERN Courier*. Retrieved 2008-02-18.
- Jump Up Sunny, Sanwar, 2011. *Green Buildings, Clean Transport and the Low Carbon Economy: Towards Bangladesh's Vision of a Greener Tomorrow*. Germany: LAP Publishers. ISBN 978-3-8465-9333-2.
- Jump up, 2004. "Roll Call: Teacher Absence in Bangladesh". Site resources.world bank.org. Retrieved 2013.
- Jump Up, 2013. "Unesco Institute for Statistics". Stats.uis.unesco.org. Retrieved.
- Jump up Seders Upali M, 2000, Institutional Capacity Building Through Human Resource Development, Directorate of Primary Education/PEDPQI Project of NORAD, Bangladesh.
- Jump up ^ "O level - GCE - Exams - British Council - Bangladesh". British Council. Retrieved 2013-10-25.
- Khan, Tasnim; Khan, Rana Ejaz Ali, 2004. "Gender Disparity in Education - Extents, Trends and Factors" (PDF). *Journal of Research (Faculty of Languages & Islamic Studies)*. Retrieved 2009-03-08
- Lapidus, M.Ira., 1997. *Sejarah Umat Islam Bagian Ketiga*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maksum, tth. *Madrasah: Sejarah & Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Munir, Musra, Muhammad, 1977. *Al- Tarbiyah al Islamiyah; Ushuluha wa Tathawuruhu fi al-Bilad al-Arabiyyah*, t.tp; A'lam al Kutub.
- Nasr, Sayyid Husain, 1993. *Spiritaulitas Islam*, Bandung: Mizan.